



Available online at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JLC>

**LEARNING COMMUNITY**  
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 7 (2), 2023, 108-115

## **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur**

**Aldy Darmanto<sup>1\*</sup>, Fuad Hasan<sup>1</sup>, Irliana Faiqotul Himmah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Jember. Jl. Kalimantan No. 37, Tegal Boto, Jember 62811, Indonesia

\* Korespondensi Penulis. Email: [aldydarmanto87@gmail.com](mailto:aldydarmanto87@gmail.com) Telp: +6282132439925

*Received: 6 Juli 2023, Revised: 9 Agustus 2023 Accepted: 2 September 2023*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pendidikan kesetaraan diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sudah berjalan baik melalui beberapa tahapan yakni 1) Forum Group Discussion, 2) Sosialisasi, 3) Pola Rekrutmen, 4) Pelaksanaan, 5) Evaluasi. Adapun hambatan yang terjadi saat proses implementasi yakni 1) Kurangnya antusias warga belajar mengikuti proses pembelajaran, 2) Keterbatasan sarana penunjang pembelajaran, 3) Penguasaan teknologi informasi yang masih kurang, dan 4) Kurang pedulinya beberapa stakeholder atas pentingnya pendidikan kesetaraan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung implementasi kebijakan yakni 1) Pendidik, 2) Sarana dan Prasarana, 3) Pembiayaan, 4) Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan 5) Inovasi Program Pendidikan Kesetaraan. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan yakni 1) Koordinasi, 2) Komunikasi, 3) Kerjasama.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan, Implementasi.

## **Implementation of the Policy for Providing Equal Education in Banyuwangi Regency, East Java Province**

### **Abstract**

*The purpose of this research is to describe how equality education policies are implemented in Banyuwangi Regency. The research method used in this research is to use a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study explained that the implementation of education policies had gone well through several stages, namely 1) Forum Group Discussion, 2) Socialization, 3) Recruitment Patterns, 4) Implementation, 5) Evaluation. The obstacles that occur during the implementation process are 1) Lack of enthusiasm by the learning community to participate in the learning process, 2) Limited learning support facilities, 3) Lack of mastery of information technology, and 4) Lack of concern for some stakeholders about the importance of equality education. In addition, there are several factors that support the implementation of the policy, namely 1) Educators, 2) Facilities and Infrastructure, 3) Funding, 4) Banyuwangi District Government Support, and 5) Equality Education Program Innovation. The efforts made by the Regional Government to overcome obstacles to policy implementation are 1) Coordination, 2) Communication, 3) Cooperation.*

**Keywords:** Policy, Education, Implementation

## PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas dari pelayanan pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), angka rata-rata lama sekolah penduduk di Indonesia yaitu 9,04 tahun pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih menempuh pendidikan hanya setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun mengalami peningkatan pada angka rata-rata lama sekolah, namun angka putus sekolah di Indonesia pada tahun juga mengalami peningkatan, hal tersebut terjadi pada semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Angka putus sekolah terbesar terjadi pada jenjang SMA yang mencapai 1,38% di tahun 2022, angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yakni sebesar 1,12%, sedangkan pada jenjang SMP tercatat 1,06% angka putus sekolah terjadi di Indonesia pada tahun 2022, meningkat 0,16% jika dilihat dari tahun 2021 yang sebesar 0,90%, dan pada jenjang SD angka putus sekolah yang terjadi sebesar 0,13%, meningkat 0,01% jika dibandingkan pada tahun 2021 yakni sebesar 0,12% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2022) pada tingkat SD/MI/Paket A sebesar 106,27%, tingkat SMP/MTS/Paket B sebesar 92,11% dan SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 85,49%. Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran untuk melanjutkan sekolah, faktor lingkungan, perhatian orang tua dan lain sebagainya menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Shemi, 2019). Selain itu, program wajib belajar 12 tahun sampai hari ini masih wacana, retorika yang masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sehingga belum maksimal (Prastiwi, 2019).

Meningkatnya angka putus sekolah menjadikan pendidikan kesetaraan sebagai jalur pendidikan utama bagi masyarakat yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat menempuh pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan adalah kebijakan pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan

formal, sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Kata kesetaraan menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki derajat yang sama dengan pendidikan formal dalam hal mutu dan penerapan standar nasional pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini melalui kebijakan pendidikan kesetaraan meluncurkan sebuah program bernama AKSARA untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi. AKSARA adalah akronim dari Akselerasi Sekolah Masyarakat, yaitu program gotong royong untuk memotivasi, mendaftarkan, mendampingi warga masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan sampai pendidikan menengah atas atau sederajat pada satuan pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebanyak 9600 warga yang mengikuti program ini yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu 638 warga mengikuti program Paket A, 3.877 warga mengikuti program Paket B, dan 5.085 warga mengikuti program Paket C yang terbagi di seluruh daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan program tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan masalah di Kabupaten Banyuwangi dalam hal pendidikan, namun apakah setelah program ini berjalan sudah cukup mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang ada. Menurut Fatkuroji (2017), kebijakan pendidikan adalah proses pemaknaan tahapan untuk penyelenggaraan pendidikan yang menghadirkan visi dan misi pendidikan, yang memiliki tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi.

## METODE

Penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2019: 206) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya nilai variabel bebas, baik satu atau lebih variabel tanpa menarik perbandingan

atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alam (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019: 18).

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat berbeda, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, dan lembaga-lembaga non formal sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Teknik purposive area digunakan peneliti dalam menentukan tempat penelitian. Teknik purposive area adalah teknik yang menetapkan sebuah tempat penelitian tanpa memilih tempat yang lain (Arikunto, 2006). Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti menggunakan teknik ini karena dalam penentuan informan atau narasumber membutuhkan sosok yang paham akan objek yang akan diteliti. Peneliti melakukan penelitian terkait dengan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga peneliti menjadikan Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Ketua Pengurus Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Banyuwangi sebagai informan kunci. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan sejak bulan September 2022 hingga Desember 2022. Rincian waktu penelitian yakni satu bulan peneliti melakukan observasi dan studi pendahuluan, dua bulan sebagai waktu penelitian lapangan, dan satu bulan terakhir untuk menyelesaikan laporan penelitian. Adapun penelitian ini juga membahas mengenai proses atau implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan dan faktor pendukung dan penghambatnya, dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari para tutor atau pendidik pada suatu lembaga pendidikan non formal sehingga peneliti memilih pengurus lembaga sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi,

wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono: 246) yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi

Pada tahapan ini, peneliti menggali sebuah informasi mengenai kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi melalui 2 informan kunci yakni Ibu Dra. Nuriyatus Sholeha, M.Pd. selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Bapak Zaki Al Mubarak, M.Si. selaku Kepala Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Sehubungan dengan hal ini, Ibu Nury selaku kepala bidang pendidikan masyarakat mendeskripsikan bahwa tujuan pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan yang harus dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan formal. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Zaki yang menyatakan bahwa tujuan dan hakikat pendidikan kesetaraan adalah pelayanan pendidikan alternatif bagi seluruh warga negara dengan basis pendekatan pendidikan nonformal yang diakui dan diatur oleh pemerintah. Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa interaksi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan non formal selaku pelaksana pendidikan kesetaraan sangat penting dalam membuat kebijakan pendidikan kesetaraan agar saat proses implementasi dapat terlaksana dengan baik.

Ibu Nury juga menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi juga sudah sesuai dengan payung hukum yang menaunginya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, dimana setiap warga belajar harus masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan dan memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN), setiap lembaga

penyelenggara harus wajib mempunyai Nomor Kepala Sekolah Nasional. Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 untuk segera menyegerakan masyarakat yang belum atau tidak bersekolah untuk bisa bersekolah kembali untuk menaikkan angka rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi melalui program Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA). Kemudian proses implementasi dan pengelolaan kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM Mubarak yang juga dikepalai oleh Bapak Zaki juga sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pendidikan kesetaraan dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendidikan kesetaraan.

Adapun indikator keberhasilan dari kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi dapat diperhatikan dari jumlah warga belajar yang terus mengalami peningkatan mulai tahun 2019 dimana jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan hanya berjumlah 5.000 orang hingga pada 2022 menjadi 25.000 orang. Melalui program Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA) diharapkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi dapat bergerak naik dan menjadikan salah satu pilihan untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk masyarakat di Kabupaten Banyuwangi agar kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak sempat menempuh pendidikan atau mengalami putus sekolah dapat terpenuhi. Latar belakang dari terciptanya program AKSARA yaitu melihat rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolahnya saat mengalami putus sekolah. Rendahnya angka tersebut dapat diselesaikan jika masyarakat dewasa bisa menyelesaikan pendidikannya minimal sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Melalui program AKSARA yang juga menyertakan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk bergerak menjadi SUARGA (Saudara Asuh Keluarga) dimana mereka diwajibkan untuk mengajak saudara atau kerabat yang berusia 23 sampai 58 tahun yang belum menuntaskan pendidikannya hingga jenjang

SLTA untuk mengikuti Kejar Paket A, B, atau C di Satuan Pendidikan Nonformal. SUARGA juga diwajibkan untuk selalu memantau setiap proses pembelajaran warga masyarakat dalam proses pembelajaran.

Selain itu, respon dari masyarakat terhadap program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi sangat baik, dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengenal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pendidikan kesetaraan serta meningkatnya angka warga belajar yang mengikuti program pendidikan kesetaraan.

### Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi

Proses implementasi sebuah kebijakan tentu melewati beberapa tahapan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nury, tahapan dari proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi. Ibu Nury menyatakan bahwa pada tahun 2021 mengenai Akselerasi Sekolah Masyarakat menetapkan beberapa tahapan yang sesuai dari beberapa dasar hukum yakni UU nomor 20 tahun 2003, UU nomor 25 tahun 2009, Permendagri nomor 120 tahun 2018 dan Perbup nomor 4 tahun 2018.

Berikut hasil dari studi dokumentasi mengenai standar operasional kegiatan akselerasi sekolah masyarakat pada gambar 1.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	
		WARGA BELAJAR	DESA	PKBM	KABID	KADIS	WAKTU	OUTPUT
1	Bimbingan Teknis Kepala PKBM untuk pembagian data AKSARA dari Dinas Pendidikan			█	█		2 jam	Data Warga Belajar dibagikan kepada PKBM
2	PKBM melakukan verifikasi data melalui desa-desa			█			1 jam	PKBM memiliki data yang valid
3	Orientasi Warga Belajar yang sudah sesuai data	█		█			60 Menit	Peremuan antara warga belajar dan PKBM
4	Bimbingan, Investigasi			█			1 jam	Bimbingan Warga belajar oleh PKBM
5	Analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah			█			30 Menit	Mengetahui data-data yg tidak valid
6	Refleksi Kegiatan			█			30 Menit	Melakukan Pelayanan yang lebih baik lagi
7	Laporan Pelaksanaan			█	█		60 Menit	Kegiatan sudah dilaksanakan

Gambar 1. Standar operasional prosedur kegiatan akselerasi sekolah masyarakat

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

### Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi

Keberadaan faktor penghambat dan pendukung suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik, tidak

terkecuali kebijakan pendidikan. Kendala yang menghambat kebijakan pendidikan kesetaraan diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi ini menurut Ibu Nury selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah semangat dari warga belajar itu sendiri. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Pak Zaki yang menyatakan bahwa Penghambat dari kebijakan pendidikan itu sendiri yang pertama adalah minat belajar masyarakat untuk mengikuti proses pembelajaran kesetaraan yang perlu ditingkatkan lagi, kedua keterbatasan sarana penunjang pembelajaran seperti komputer untuk pelaksanaan ujian, ketiga yakni kurang pedulinya beberapa stakeholder akan pentingnya pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten banyuwangi dan penguasaan teknologi informasi yang masih kurang. Adapun Ibu Maya yang bertugas sebagai tutor di PKBM Mubarak juga menyatakan hal yang sama bahwa kesulitan selama proses pembelajaran yakni dari pihak warga belajar itu sendiri. Sedangkan faktor pendukung dari implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi yang disampaikan oleh Ibu Nury adalah ada insentif, ada kerja sama dengan desa, kemudian kita juga memfasilitasi ujian-ujian dan sebagainya. Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Zaki yang menyatakan bahwa factor pendukung dari kebijakan pendidikan kesetaraan yaitu pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, dukungan pemerintah kabupaten banyuwangi, dan inovasi program kesetaraan.

### **Upaya Menangani Sebuah Hambatan dalam Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi**

Kewenangan dinas pendidikan bidang pendidikan masyarakat dalam menaungi lembaga pendidikan non formal dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada saat proses implementasi kebijakan yakni melakukan koordinasi, berkomunikasi dan ikut aktif dalam pelaksanaan kebijakan, dinas pendidikan berperan sebagai fasilitator guna berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kekurangan yang dialami oleh

lembaga pendidikan non formal dalam melaksanakan program pendidikan kesetaraan. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Zaki yang menyatakan adanya upaya dari pemerintah daerah yang telah mengadakan banyak kegiatan dan program pendukung untuk pendidikan kesetaraan, adanya bantuan insentif untuk tutor kesetaraan, adanya bantuan saran dan peralatan pembelajaran dan bantuan komunikasi dan jaringan hingga ke desa.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan upaya-upaya pemerintah daerah untuk terlaksananya kebijakan pendidikan kesetaraan. Kebijakan pendidikan Akselerasi Sekolah Masyarakat sebagai kebijakan jangka Panjang sudah seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik.

### **Pembahasan**

#### **Tantangan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi**

Proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi bukanlah tanpa sebuah tantangan, antusias dari warga belajar untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan kesetaraan yang masih rendah menjadi salah satu permasalahannya, hal ini disebabkan oleh banyaknya warga belajar yang bekerja dan tidak mempunyai waktu untuk mengikuti proses pembelajaran. Bekerja untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga menjadi hal yang lebih penting daripada mengikuti pembelajaran, selain itu faktor ekonomi juga mengakibatkan warga belajar tidak mau melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian, peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai instansi tertinggi sangat berpengaruh untuk memberikan dukungan kepada satuan pendidikan nonformal seperti bantuan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk dapat digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain pentingnya dukungan pemerintah daerah, upaya yang dilakukan tutor dalam meningkatkan proses pembelajaran yakni dengan mengoptimalkan perannya sebagai pendidik untuk menerapkan metode belajar yang menarik sehingga menarik minat dari warga belajar untuk mengikuti pembelajaran. Siswanto

(2013: 38) mengartikan minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan aktivitas secara tetap, adapun menurut Slameto (2013: 57) minat memiliki pengaruh besar terhadap belajar baik proses maupun hasilnya, yaitu bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Hal tersebut didukung pendapat Susanto (2014: 66-67) yang menyatakan bahwa faktor minat merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, tutor perlu memiliki keterampilan untuk pekerjaan mereka sebagai pendidik karena pendidik merupakan faktor kunci dalam penentu keberhasilan pendidikan.

Selain dari antusias warga belajar yang masih kurang, penguasaan teknologi yang masih kurang juga menjadi tantangan bagi proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat seiring dengan kebutuhan manusia, termasuk pada bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), masih banyak warga belajar yang kesulitan dalam mengoperasikan komputer untuk mengerjakan soal-soal ujian. Menurut Selwyn (2011), penggunaan teknologi digital memiliki peran dalam mendukung dan meningkatkan proses kognitif peserta didik dan keterampilan berpikir. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di satuan pendidikan non formal. Warga belajar perlu diajarkan untuk memahami komputer dan bagaimana pengoperasiannya. Teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses yang kompleks dan terintegrasi yang menggabungkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, menemukan solusi, menerapkan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah di semua aspek pembelajaran manusia (Fitria, 2013). Oleh karena itu, perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, komputer menjadi bagian penting sebagai media belajar untuk warga belajar. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Banyuwangi perlu

memenuhi segala kebutuhan yang menjadi hal penting bagi satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mahmud (2008: 13) dalam bukunya ICT Untuk Sekolah Unggul terdapat berbagai prasyarat pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya yang terpenting adalah penyediaan infrastruktur yang memungkinkan pembelajaran berbasis TIK.

### **Peluang Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi**

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan program Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA) sejak tahun 2021, dimana program ini diadakan untuk memberikan motivasi, mendaftarkan dan mendampingi warga masyarakat yang belum menuntaskan pendidikannya sampai pendidikan menengah atas atau sederajat melalui pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Pendidikan kesetaraan dapat membantu masyarakat untuk melihat kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat sehingga mereka dapat memberdayakan dirinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk warga belajar terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dengan adanya motivasi yang muncul dalam masyarakat, akan memudahkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Pemberian motivasi kepada masyarakat dapat berupa rangsangan yang bersifat memancing, contohnya dengan memberikan hadiah kepada setiap orang yang mengikuti pendidikan kesetaraan dan dilanjutkan dengan pemberian motivasi untuk memperbaiki kehidupan.

Peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya semakin terbuka seiring dengan semakin dipahaminya konsep pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan sepanjang hayat yang esensinya adalah pendidikan nonformal, sebagaimana

diakui dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 sampai dengan 7. Peluang ini harus di manfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tak bisa mengenyam pendidikan formal (Zubaedi, 2004:130). Dengan adanya pendidikan kesetaraan, dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya yang nantinya dapat digunakan untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Keterampilan diharapkan mampu menjadi wadah bagi mereka yang ingin mengembangkan potensinya, sehingga dapat menghasilkan karya kreatif dan inovatif di bidangnya (Verani, dkk., 2020). Saputro, 2020), Rosita, dkk (2022).

. Pendidikan nonformal memiliki peran dan peluang yang besar dalam meningkatkan keterampilan fungsional, membentuk sikap dan kepribadian profesional, serta mengembangkan keterampilan hidup bagi masyarakat luas, tanpa memandang usia, lokasi, waktu, maupun kemampuan. Karakter sistem pendidikan, termasuk organisasi layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal, harus menjadi landasan bagi pendidikan nonformal yang berkualitas.

Dengan adanya keterampilan yang didapat dari pendidikan kesetaraan menjadi wadah bagi warga belajar untuk meningkatkan taraf hidupnya dan untuk pengentasan kemiskinan. Menurut Dayat (2016:135), warga belajar yang mengikuti Paket C memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Dampak positif yang diantisipasi oleh warga belajar kejar paket C adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka setelah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dayat (2016: 133) juga menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk memaksimalkan potensinya. Maka dari itu, pendidikan merupakan layanan yang harus tersedia untuk masyarakat umum, yaitu semua warga negara.

## SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yakni mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di

Kabupaten Banyuwangi, didukung dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi sudah terlaksana dengan baik dengan melalui beberapa alur proses diantaranya: 1) *Focus Group Discussion*, 2) Sosialisasi, 3) Pola Rekrutmen, 4) Pelaksanaan, dan 5) Evaluasi. Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat saat proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan maupun dalam proses pembelajarannya seperti: 1) Kurangnya Antusias Warga Belajar Mengikuti Proses Pembelajaran, 2) Keterbatasan Sarana Penunjang Pembelajaran, 3) Penguasaan Teknologi Informasi yang Masih Kurang, dan 4) Kurang Pedulinya Beberapa Stakeholder Akan Pentingnya Pendidikan Kesetaraan. Selain adanya beberapa hambatan, proses implementasi kebijakan juga terdapat beberapa aspek pendukung yang terus mengoptimalkan proses implementasi kebijakan, beberapa faktor yang menjadi pendukung dari proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyuwangi antara lain: 1) Pendidik, 2) Sarana dan Prasarana, 3) Pembiayaan, 4) Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan 5) Inovasi Program Pendidikan Kesetaraan. Selain itu, terdapat beberapa upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi selaku institusi yang bergerak pada bidang pendidikan guna mengatasi permasalahan yang ada pada saat proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan berlangsung yakni dengan cara: 1) Koordinasi, 2) Komunikasi, dan 3) Kerja sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Jakarta: BPS
- Dayat, H. (2016). *Pembelajaran Partisipatif Keterampilan Berwirausaha Untuk Pemberdayaan Ekonomi Warga*



- Belajar Kejar Paket C. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 133-135.
- Fatah, A., Suhaili, M., & Farida, I. (2021). Analisis Indikator Pendidikan: Analisis Partisipasi di Indonesia Periode 1994-2018. *Jurnal kependidikan*, 7 (3), 561.
- Fatkuroji. (2017). Implementasi kebijakan pembelajaran terpadu dan minat pelanggan pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(2), 2840.
- Fitria, H. (2018). Pengembangan Strategi Problem Based Learning pada Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar. *Seminar Pendidikan Nasional* (p. 1279). Palembang: Universitas PGRI Palembang.
- Isjoni., Ismail, M.A., dan Mahmud, R. (2008). *ICT Untuk Sekolah Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Istiqomah, N., Fakhruddin., & Utsman. (2017). Evaluasi Mutu Layanan Pendidikan Kesetaraan pada PKBM Citra Ilmu di Semarang. *Journal of Nonformal Education*, 3(2), 150.
- Lestari, S. (2018). Peran Teknologi Dalam Pendidikan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 95.
- Prastiwi, D. (2019, Februari 11). *Merdeka*. Retrieved Januari 23, 2023, from Merdeka: <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendikbud-akui-wajib-belajar-12-tahun-belum-maksimal.html>
- Rosita, E., Hilmi, M. I., & Imsiyah, N. (2022). "Setara Daring" Learning Management on Learning Results In Package C at PKBM Lestari Banyuwangi. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 10(2), 349-356.
- Saputro, D., Hendrawijaya, A., & Ariefianto, L. (2020). Peran Profesionalisme Tutor Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Warga Belajar Paket C Di PKBM Al-Muttaqin Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 70-73. doi:10.19184/jlc.v3i2.16805
- Selwyn, N. (2011). *Education and Technology Key Issues and Debates*. India: Replika Press Pvt Ltd.
- Shemi, H. (2019). *idntimes*. Retrieved Januari 23, 2023, from idntimes: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/angka-putus-sekolah-di-indonesia-yang-mengkhawatirkan>
- Siswanto. (2013). *Membangun Motivasi Belajar Pendidikan Non Formal*. Semarang: Unnes Press.
- Slameto. (2013). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyani., Napitupulu, A. P., Armyliyanda, N., & Emayanti, M. (2021). Peluang, Tantangan, dan Problematika Pendidikan Luar Sekolah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 287.
- Susanto, A. (2014). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. *Kependidikan*, 7(3), 561.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- Verani, U., Imsiyah, N., & Hilmi, M. (2020). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Peningkatan Partisipasi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Di PKBM Nurul Huda Kabupaten Jember. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 50-58. doi:10.19184/jlc.v3i2.16802
- Zubaedi. (2004). *Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.